



► **SAMPAH JADI LISTRIK**

Pemkot Nego Biaya Land Clearing

Catur Dwi Janati, Stefani Yulindriani & Lugas Subarkah
redaksi@harianjogja.com

JOGJA—Pemerintah Pusat meminta setiap kabupaten/kota mengalokasikan anggaran untuk pembangunan pengolahan sampah energi listrik (PSEL). Untuk pembangunan PSEL di DIY, Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja diminta mengalokasikan

anggaran untuk *land clearing* atau proses pembersihan lahan. Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, menyebut kebutuhan *land clearing* diperkirakan mencapai sekitar Rp15 miliar. Meski begitu, dia mengakui masih berupaya melakukan negosiasi agar pembiayaan dapat sepenuhnya dibiayai Pemerintah Pusat. "APBD dimintai untuk kontribusi terutama *land clearing*. Tapi saya masih menawar. Kalau

bisa *land clearing*-nya dari Danantara," katanya di Balai Kota Jogja, pada Selasa (2/12). Menurut Hasto, proyek pembangunan PSEL telah sampai pada tahap lelang pihak ketiga yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut. Sementara pemenaug lelang diperkirakan akan ditentukan pada Januari 2026.

► Halaman 10

KAPASITAS PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMPAH

PT PLN telah melakukan survei dan menyusun pra-studi kelayakan untuk tujuh lokasi *pilot project* pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSA).



- Total kapasitas listrik di tujuh kota 197,4 megawatt (MW)
- Sampah yang bisa dikelola per hari hampir 12.000 ton.
- PLN ditugaskan untuk membeli listrik yang dihasilkan PSEL dengan harga US\$0,20 atau 20 sen per kWh untuk seluruh kapasitas.

Lokasi di Medan, Kabupaten Tangerang, Bogor Raya, Bekasi, Semarang, DIY, dan Bali.

Pemkot Nego...

Setelah itu, menurutnya peletakan batu pertama atau *ground breaking* sebagai tahap awal pembangunan bangunan PSEL tersebut akan dilakukan pada Maret 2026. Setelah itu, diperkirakan pembangunan bangunan PSEL akan rampung dalam 19 bulan. Pekerjaan konstruksi tersebut diperkirakan akan rampung pada akhir 2027.

Menurut Hasto, nantinya Pemkot Jogja mengolah sampah sekitar 300 ton melalui fasilitas pengolahan sampah regional tersebut. Jumlah tersebut pun merupakan seluruh produksi sampah harian Pemkot Jogja.

Ia pun menyebut nantinya ketika fasilitas pengolahan sampah regional tersebut telah beroperasi secara efektif, Pemkot Jogja akan menutup seluruh TPS3R yang ada di Kota Jogja. "Kalau itu sudah ada, kami akan menutup semua unit pengolahan [sampah] kita, dan bergabung di sana."

Sambil menunggu fasilitas pengolahan sampah beroperasi, kata Hasto, Pemkot Jogja terus menangani darurat sampah, termasuk mengatur pola pengangkutan sampah dan menguatkan program pengurangan sampah dari sumber.

Sarana Pendukung

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sleman, Sugeng Riyanta, Pemkab Sleman tidak dibebani

anggaran dalam investasi PSEL. Akan tetapi, daerah dikenai tugas untuk memastikan kesiapan lahan dan sejumlah sarana pendukung. "Pembangunan PSEL, daerah tidak dibebankan angsuran anggaran. Daerah hanya menanggung untuk kesiapan lahan, infrastruktur pendukung dan kesiapan pengumpulan atau pengangkutan sampah sampai ke lokasi PSEL," kata Sugeng.

Dalam materi yang disampaikan Sugeng, lokasi calon lahan PSEL Kabupaten Sleman, Kota Jogja dan Kabupaten Bantul terletak di lahan eks KPBU TPA Piyungan. Luas lahan tersebut mencapai 5,7 hektare yang akan terbagi menjadi tiga sertifikat. Status kepemilikan lahan tersebut merupakan Aset Pemda DIY.

Pada tahap awal, lahan perlu untuk ditata sebelum dibangun PSEL. Pemkab Sleman lanjut Sugeng juga harus menyiapkan jalan menuju PSEL. "Lahan saat ini perlu ditata untuk siap dibangun konstruksinya. Infrastruktur lain berupa akses jalan dan ketersediaan air bersih," jelasnya.

Ihwal nominal anggaran yang digelontorkan untuk proses penyiapan lahan hingga infrastruktur penunjang, Sugeng bilang jumlah anggaran tersebut masih dihitung. Selain itu, kata dia perhitungan anggaran ini juga membutuhkan kesepakatan dari

Pemkab Bantul, Pemkot Kota Jogja dan Pemprov DIY.

"Kebutuhan anggaran sedang dihitung dan perlu kesepakatan dengan Bantul, Kota Jogja, termasuk Pemprov DIY terkait dengan status jalan," ujarnya.

Rencananya, timbulan sampah dari Kabupaten Sleman yang akan diolah di PSEL mencapai 450 ton sampah per hari.

Operasional PSEL

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan (DLHK) DIY, Kusno Wibowo, menjelaskan Pemda DIY sudah mendukung program ini dengan penyiapan lahan beserta *land clearing*. Sedangkan untuk operasional PSEL menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat melalui Danantara, yang dilaksanakan oleh perusahaan pemenang lelang. "Untuk transportasi sampahnya dari pemerintah kabupaten/kota," katanya.

Ia belum merinci berapa banyak anggaran yang akan dialokasikan untuk keperluan dukungan daerah tersebut. Adapun progress sejauh ini di tingkat pusat sudah memasuki lelang calon Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). "Januari pengumuman pemenangnya kalau sesuai jadwal. Di tingkat daerah, kami finalisasi draf kerja sama antar kabupaten/kota dan DIY."

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Lingkungan Hidup			

Yogyakarta, 17 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005